

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun.

Seiring dengan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2022 bersamaan dengan selesainya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten / Kota Tahun 2023-2026.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, maka secara sinergi pula Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perhubungan dan tugas perbantuan berkewajiban menyusun sebuah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026). Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kota Tebing Tinggi.

Mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang maju dan sejahtera tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Transportasi memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategik dalam Pembangunan Daerah. Transportasi berperan sebagai penggerak dan pendorong dalam memperlancar roda kegiatan perekonomian serta berperan penting dalam produksi, distribusi, dan arus pergerakan penumpang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah. Renstra Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 diharapkan dapat memberikan jawaban terciptanya suatu sistem transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kota Tebing Tinggi, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Government*)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi; Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu-isu strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat uraian terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Memuat dengan ringkas tentang pelaksanaan, kaidah pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

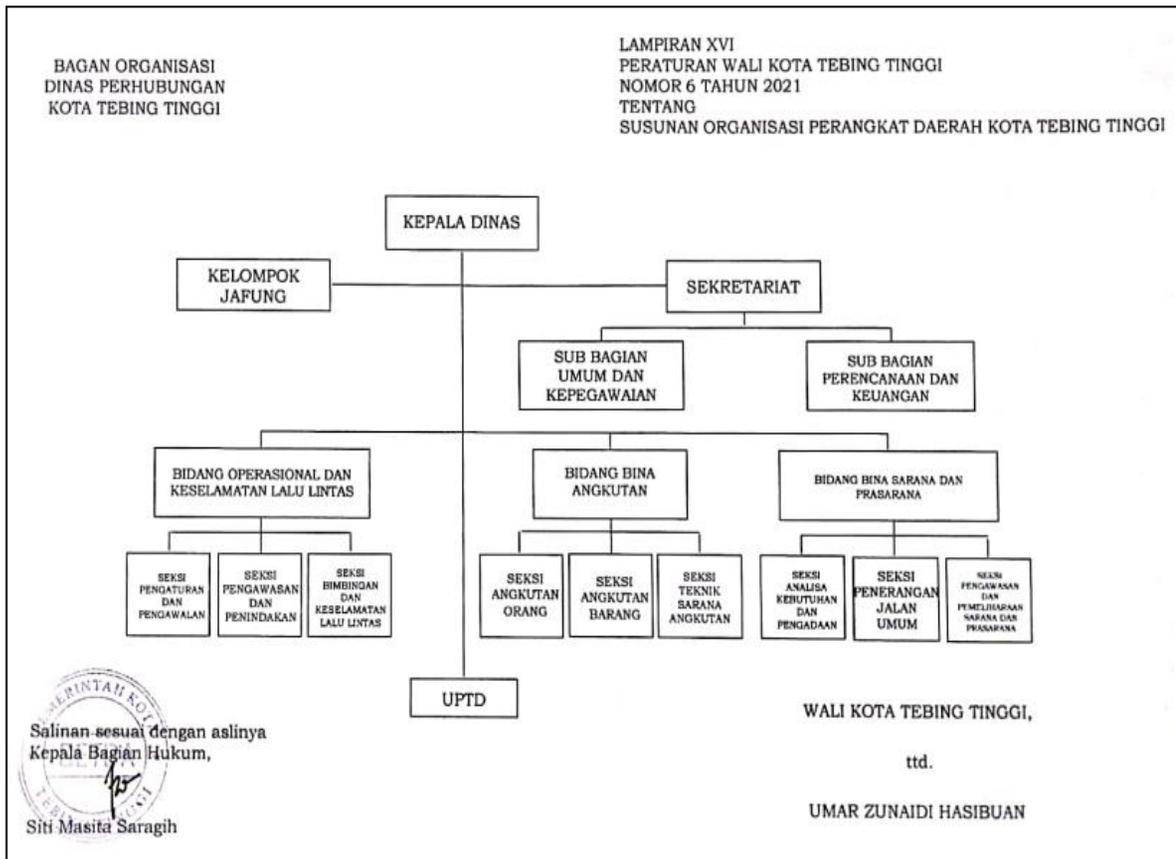
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah membantu Wali ota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan, sedangkan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dijabarkan secara hirarki sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja, Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi memiliki pegawai sejumlah 89 orang terdiri dari 36 orang berstatus PNS dan 53 orang berstatus tenaga kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut:

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

No	Uraian	Jumlah (orang)
A	Kepala Dinas	1
B	Sekretaris	1
C	Kepala Bidang	3
1	Sekretariat	
	- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3
	- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	4
2	Bidang Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	
	- Seksi Pengaturan dan Pengawasan	3
	- Seksi Pengawasan dan Penindakan	0
	- Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	1
3	Bidang Bina Angkutan	
	- Seksi Angkutan Orang	1
	- Seksi Angkutan Barang	0
	- Seksi Teknik Sarana Angkutan	0
4	Bidang Bina Sarana dan Prasarana	
	- Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan	0
	- Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2
	- Seksi Penerangan Jalan Umum	2
5	UPTD Perparkiran	2
6	UPTD Terminal	3
7	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	6
8	UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan	3
Jumlah		35

Tabel 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	25
2	Perempuan	10
Jumlah		35

Tabel 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	1
2	SMP	1
3	SLTA	9
4	Sarjana Muda / D-III/ D-II/ D-I	8
5	Sarjana (S1) / D-IV	11
6	Sarjana Transportasi	2
7	Pasca Sarjana	3
Jumlah		35

Tabel 2.4
Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah (orang)
1.	Juru Muda Tk. I	I/b	1
2.	Juru Tingkat I	I/d	1
3.	Pengatur Muda	II/a	0
4.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	4
5.	Pengatur	II/c	3
6.	Pengatur Tk. I	II/d	4
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Penata Muda Tk. I	III/b	6
9.	Penata	III/c	7
10.	Penata Tk I	III/d	3
11.	Pembina	IV/a	2
12.	Pembina Tk. I	IV/b	0
13.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
Jumlah			35

Tabel 2.5
Komposisi PNS Berdasarkan Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II / a	1
2	Eselon III / a	1
3	Eselon III / b	3
4	Eselon IV / a	11
5	Eselon IV / b	2
Jumlah		18

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gunung Leuser BP 7 Kota Tebing Tinggi.
2. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan mengoperasikan 1 unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlokasi di dalam terminal utama (Terminal Bandar Kajum).
3. Terminal. Terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kota Tebing Tinggi memiliki 2 (dua) buah terminal yaitu terminal utama dan terminal pembantu.
4. Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua.

Tabel 2.6
Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Kondisi		Jumlah (unit)
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan dinas roda empat	2	-	2
2	Kendaraan dinas patroli roda empat	2	-	2
3	Kendaraan dinas patroli pengawal roda empat	1	-	1
4	Kendaraan dinas patroli roda dua	2	-	2
5	Kendaraan dinas Kantor roda dua	9	-	9
6	Bus	2	-	2
J u m l a h		18	-	18

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di wilayah Kota Tebing Tinggi, utamanya dalam pelayanan transportasi. Perhubungan sebagai urat nadi dan sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, memegang peran penting dalam mendukung aktivitas dan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kota, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perhubungan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rencana 5 (lima) tahunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Tahun 2017-2021 pada Dinas dapat dilihat secara berturut-turut pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase angkutan umum yang laik jalan	-	-	-	75%	78%	82%	83%	85%	70,50%	78,74%	81,78%	90,25%	n/a	82,94%	92,64%	96,21%	106,18%	-
2	Persentase Angkutan Umum Yang Beroperasi Sesuai Ketentuan	-	-	-	n/a	n/a	70%	70%	70%	n/a	n/a	65,00%	60,48%	n/a	n/a	n/a	92,86%	86,40%	-
3	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk	-	-	-	25,10 Km/Jam	25,60 Km/Jam	26,10 Km/Jam	26,60 Km/Jam	27,10 Km/Jam	24,80 Km/Jam	27,40 Km/Jam	28,20 Km/Jam	28,00 Km/Jam	n/a	91,51%	101,11%	104,06%	103,32%	-
4	Persentase Lokasi Rawan Kecelakaan Teratasi	-	-	-	n/a	n/a	87%	90%	95%	n/a	n/a	85%	75%	n/a	n/a	n/a	94,44%	78,95%	-

Berdasarkan tabel 2.7 diatas dapat diinterpretasikan atau disimpulkan secara ringkas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (IKU OPD) selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

1. Capaian indikator Persentase angkutan umum yang laik jalan paling tinggi terealisasi pada Tahun 2021 mencapai sebesar 106,18 %. Terjadi kenaikan capaian secara konsisten dari tahun ke tahun. Keberhasilan capaian ini didukung oleh banyak faktor antara lain :
 - a. Ketersediaan SDM yang memadai dan kualitas layanan aparatur pelaksana pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Sarana dan prasarana pengujian kendaraan telah terstandarisasi dan terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan;
 - c. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara non tunai, sehingga wajib retribusi akan membayarkan sesuai dengan tarif yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah;
 - d. Semakin giatnya dilaksanakan razia secara berkala dan penindakan secara tegas terhadap angkutan umum yang beroperasi namun belum melakukan pengujian berkala.
2. Capaian indikator Persentase Angkutan Umum Yang Beroperasi Sesuai Ketetapan paling tinggi terealisasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 92,86%. Faktor penghambat tidak tercapainya target dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2019 dan Tahun 2021) diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Perilaku masyarakat yang merasa lebih nyaman menggunakan angkutan pribadi;
 - b. Jaringan trayek angkutan sudah tidak memadai;
 - c. Supir angkutan yang tidak disiplin.

Berdasarkan faktor penghambat diatas yang berhasil diidentifikasi, dirumuskan langkah-langkah strategi dan solusi yang akan dilakukan, antara lain :

- a. Menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman, yang dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan laik jalan;
 - b. Memperbaharui jaringan trayek angkutan umum perkotaan yang lebih representatif;
 - c. Memberikan sanksi bagi perusahaan angkutan umum yang ugal-ugalan.
3. Capaian indikator Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk, paling tinggi terealisasi pada Tahun 2020 sebesar 104,06%, namun selama 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu tahun 2019 s.d. 2021 pencapaiannya sudah mencapai 100%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh banyak faktor antara lain :
 - a. Keberadaan petugas di lapangan yang ditempatkan pada titik-titik rawan kemacetan, seperti di sekolah-sekolah, pusat perbelanjaan, persimpangan-persimpangan yang belum dipasang Warning Light maupun Traffic Light;
 - b. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan seperti Warning Light, Traffic Light, rambu, marka sehingga dapat berfungsi mengurangi tingkat kemacetan;

- c. Adanya sosialisasi secara rutin kesekolah sekolah sosialisasi kepada para Kepala Lingkungan tentang tata tertib berlalu lintas;
 - d. Razia atau operasi penertiban serta penindakan dilakukan secara berkala.
4. Capaian indikator Persentase Lokasi Rawan Kecelakaan Teratasi, paling tinggi terealisasi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 94,44%, Faktor penghambat tidak tercapainya target dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2019 dan Tahun 2021) diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :
- a. Lokasi rawan kecelakaan letaknya berada di sepanjang Jalan Nasional dan Jalan Propinsi;
 - b. Perilaku masyarakat yang melakukan pencurian maupun pengrusakan fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
 - c. Keterbatasan anggaran sebagai akibat rasionalisasi atau refocusing untuk penanganan covid-19.

Berdasarkan faktor penghambat diatas yang berhasil diidentifikasi, dirumuskan langkah-langkah strategi dan solusi yang akan dilakukan, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dan Pemerintah Propinsi. Diharapkan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) maupun Pemerintah Propinsi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dalam hal pembiayaan, baik melalui pemberian alokasi dana DAK maupun Bantuan Keuangan Propinsi;
- b. Menindak secara tegas pelaku pencurian maupun pengrusakan fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
- c. Menentukan skala prioritas dengan menyesuaikan pada ketersediaan anggaran.

Tabel 2.7.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	967.484	916.880	1.080.000	648.000	688.000
2	Rasio Ijin Trayek	1 : 2.678	1 : 2.427	1 : 2.454	1 : 8.642	1 : 5.832
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.401	2.431	2.994	2.895	6.409
4	Jumlah Terminal Bis	1	2	2	2	2
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	92,24	87,42	21,8	52,4	53,4
6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	72,70	70,50	78,74	81,78	90,25
7	Pemasangan Rambu-Rambu	5	6	14	68	3
8	Jumlah Orang Melalui Bandara/Terminal Per Tahun	63.360	63.720	53.460	12.516	17.280

Berdasarkan tabel 2.7.1 diatas dapat diinterpretasikan atau disimpulkan secara ringkas tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum paling banyak terangkut pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 1.080.000 orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat antusias untuk lebih menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas sehari-hari. Namun pada tahun 2020 jumlahnya menurun cukup signifikan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas/kegiatan masyarakat atau *sosial distancing*.
2. Capaian kinerja untuk indikator Rasio Ijin Trayek paling baik terdapat pada Tahun 2021 dimana dengan rasio sebesar 1 : 2.454. Capaian tersebut menggambarkan bahwa setiap ijin trayek angkutan umum yang diterbitkan akan melayani penumpang sebanyak 2.454 orang. Kondisi ini menunjukkan minimnya jumlah angkutan umum yang tersedia untuk melayani masyarakat Kota Tebing Tinggi, dan kesadaran pengusaha angkutan umum untuk mengurus izin trayek angkutan.
3. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah uji kir angkutan Umum paling baik terjadi pada tahun 2021 sebesar 6.409 unit. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebagai akibat banyaknya angkutan umum dari luar daerah Kota Tebing Tinggi melakukan pengujian di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tebing Tinggi. Kondisi ini sebagai dampak dari tidak beroperasinya beberapa Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota karena belum dapat izin rekomendasi operasional dari Kementerian Perhubungan.
4. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Terminal Bis yang aktif beroperasi sejak tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 2 (dua) unit, yaitu Terminal Bandar Kajum dan Terminal Bandar Sakti. Dengan beroperasinya kedua terminal tersebut maka perpindahan antar moda bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum menjadi lebih mudah.
5. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Layanan Angkutan Darat paling baik pada tahun 2017 sebesar 92,24%. Capaian tersebut menunjukkan menggambarkan angkutan umum pada tahun 2017 konsisten untuk tetap beroperasi sesuai dengan jaringan trayek yang sudah ditetapkan. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 21,8%. Hal tersebut diakibatkan sebagai akibat buruknya manajemen perusahaan angkutan umum sehingga banyak angkutan umum yang enggan untuk beroperasi.
6. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum paling tinggi pada Tahun 2021 sebesar 90,25%. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebagai akibat banyaknya angkutan umum dari luar daerah Kota Tebing Tinggi melakukan pengujian di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tebing Tinggi. Kondisi ini sebagai dampak dari tidak beroperasinya beberapa Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di

Kabupaten/Kota karena belum dapat izin rekomendasi operasional dari Kementerian Perhubungan.

7. Capaian kinerja untuk indikator Pemasangan Rambu-Rambu paling banyak pada tahun 2020, tingginya capaian tersebut karena Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi mendapatkan bantuan Dana Alokasi Anggaran (DAK) Tahun 2020 untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada beberapa ruas jalan yang terkoneksi dengan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Pada tahun 2021 pemasangan rambu-rambu lalu lintas hanya sebanyak 3 unit, karena pada tahun 2021 lebih difokuskan untuk melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang sudah rusak.
8. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Orang Melalui Bandara/Terminal Per Tahun paling banyak tahun 2021 sebanyak 63.720 orang, sedangkan pada tahun 2020 paling sedikit hanya sebanyak 12.516 orang. Terjadinya penurunan cukup signifikan pada Tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau *sosial distancing*.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	Anggaran 2017	Anggaran 2018	Anggaran 2019	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	1.612.000.000,00	2.044.000.000,00	2.200.700.000,00	1.980.400.000,00	1.411.200.000,00	1.089.023.000,00	1.299.278.600,00	1.613.833.000,00	1.109.833.000,00	1.512.268.200,00	67,56%	63,57%	73,33%	56,04%	107,16%	-1,07%	12,14%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.612.000.000,00	2.044.000.000,00	2.200.700.000,00	1.980.400.000,00	1.411.200.000,00	1.089.023.000,00	1.299.278.600,00	1.613.833.000,00	1.109.833.000,00	1.512.268.200,00	67,56%	63,57%	73,33%	56,04%	107,16%	-1,07%	12,14%
BELANJA	8.710.818.250,00	8.608.407.500,00	8.368.151.898,00	6.978.242.285,00	7.043.104.450,00	8.562.756.230,00	8.345.280.247,00	8.157.521.205,00	6.585.568.161,00	6.709.931.411,00	98,30%	96,94%	97,48%	94,37%	95,27%	-4,91%	-5,54%
Belanja Operasi	6.594.136.550,00	7.949.457.500,00	7.110.503.498,00	6.276.983.285,00	6.806.821.995,00	6.457.457.330,00	7.742.710.247,00	6.902.637.805,00	5.886.713.161,00	6.483.505.247,00	97,93%	97,40%	97,08%	93,78%	95,25%	1,68%	1,12%
Belanja Pegawai	3.465.800.000,00	3.614.518.000,00	3.439.650.000,00	3.627.413.828,00	3.424.386.865,00	3.411.844.729,00	3.534.017.282,00	3.329.542.840,00	3.345.767.091,00	3.247.862.313,00	98,44%	97,77%	96,80%	92,24%	94,85%	-0,17%	-1,16%
Belanja Barang	3.128.336.550,00	4.334.939.500,00	3.670.853.498,00	2.649.569.457,00	3.382.435.130,00	3.045.612.601,00	4.208.692.965,00	3.573.094.965,00	2.540.946.070,00	3.235.642.934,00	97,36%	97,09%	97,34%	95,90%	95,66%	5,77%	5,39%
Belanja Modal	2.116.681.700,00	658.950.000,00	1.257.648.400,00	701.259.000,00	236.282.455,00	2.105.298.900,00	602.570.000,00	1.254.883.400,00	698.855.000,00	226.426.164,00	99,46%	91,44%	99,78%	99,66%	95,83%	-22,14%	-18,76%
Belanja Peralatan dan Mesin	958.906.700,00	411.950.000,00	790.248.400,00	248.659.000,00	113.770.100,00	956.247.900,00	355.850.000,00	788.428.400,00	246.365.000,00	104.931.164,00	99,72%	86,38%	99,77%	99,08%	92,23%	-22,00%	-16,85%
Belanja Gedung dan Bangunan	1.157.775.000,00	247.000.000,00	467.400.000,00	452.600.000,00	122.512.355,00	1.149.051.000,00	246.720.000,00	466.455.000,00	452.490.000,00	121.495.000,00	99,25%	99,89%	99,80%	99,98%	99,17%	-16,38%	-16,40%
Surplus / (Defisit)	(7.098.818.250,00)	(6.564.407.500,00)	(6.167.451.898,00)	(4.997.842.285,00)	(5.631.904.450,00)	(7.473.733.230,00)	(7.046.001.647,00)	(6.543.688.205,00)	(5.475.735.161,00)	(5.197.663.211,00)	105,28%	107,34%	106,10%	109,56%	92,29%	-4,96%	-8,56%

Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat diinterpretasikan rasio antara realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja yang baik dan kurang baik yang diukur berdasarkan pencapaiannya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan.

1. Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan merupakan penerimaan yang bersumber 4 (empat) jenis retribusi yang terdiri dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum (retribusi terminal), dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum. Rasio antara target dan realisasi pendapatan paling baik antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat pada tahun 2021, dimana target pendapatan sebesar Rp 1.411.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.512.268.200,00 atau sebesar 107,16%. Kondisi ini menunjukkan adanya over realisasi atau dengan kata lain realisasi melebihi target yang direncanakan sebesar 7,16%. Untuk pencapaian paling rendah terjadi pada tahun 2020, dimana pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 1.980.400.000,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp 1.109.833.000,00 atau sebesar 56,04%. Rendahnya capaian penerimaan ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret Tahun 2020 sehingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan, antara lain Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dimana aktivitas masyarakat sangat dibatasi yang sedikit banyak berpengaruh pada penerimaan retribusi daerah.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja paling baik terdapat pada tahun 2017, dimana anggaran untuk belanja sebesar Rp 8.710.818.250,00 dapat terealisasi sebesar Rp 8.562.756.230,00 atau sebesar 98,30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada tahun 2017 lebih tinggi dari penyerapan anggaran pada tahun anggaran lainnya. Untuk pencapaian yang paling rendah berada pada tahun 2020, dimana anggaran belanja sebesar Rp 6.978.242.285,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.585.568.161,00 atau sebesar 94,37%. Selisih antara rasio penyerapan tertinggi yaitu pada tahun 2017 dan rasio penyerapan terendah yaitu pada tahun 2020 hanya sebesar 23,93%, kondisi ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan/perbedaan yang signifikan. Semua kegiatan secara fisik telah terlaksana 100%, adanya selisih antara anggaran dan realisasi tersebut lebih disebabkan oleh adanya efisiensi atau penghematan belanja dan faktor kesalahan perhitungan anggaran belanja.
3. Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), rata-rata penyerapan anggaran belanja mencapai 96,47% yang berarti bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program kegiatan sudah sangat baik. Pencapaian ini merupakan hasil komitmen bersama antara kepala SKPD dengan perangkat organisasi dalam melaksanakan semua program kegiatan yang telah disusun dan direncanakan setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing perangkat organisasi. Dalam pencapaian tersebut juga didukung oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan melibatkan seluruh perangkat organisasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seluruh perangkat organisasi turut serta berperan dalam dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan rapat-rapat internal dinas, baik untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan maupun untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.
- d. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap kemajuan atau pencapaian seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada RPD, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1. Analisis Renstra Kementerian Perhubungan

Dalam arahan RPJMN 2020 – 2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi meliputi : Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah (ICOR tinggi 6,7), dan Total Factor Productivity (TFP) rendah. Disisi lain, target pertumbuhan ekonomi 2020 – 2024 berada pada kisaran 5,2%-5,5% (rendah) hingga kisaran 5,4% - 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di tahun 2036. Target pertumbuhan 5,4% - 6% memerlukan dukungan aspek transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi. Dari sisi permintaan (jangka pendek), investasi di kawasan industri dan KEK memerlukan konektivitas akses dari lokasi asal produksi hingga ke lokasi simpul terdekat untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang pro-investasi penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat diperlukan sebagai stimulus perekonomian Indonesia (*counter-cyclical policy*). Sementara itu, sejalan dengan sisi produksi (jangka menengah), maka konektivitas layanan dalam distribusi logistic akan mendorong peningkatan produktivitas (TFP, modal, tenaga kerja) melalui penciptaan lapangan kerja baru berbasis ekonomi domestik yang lebih tangguh.

2. Analisis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Meningkatnya pemerataan pelayanan umum di bidang perhubungan dengan prioritas pada wilayah kepulauan, wilayah yang terlambat perkembangannya, wilayah potensial dan wilayah yang perkembangannya cukup dinamis;

2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang murah, aman, nyaman, mudah, dan cepat, dengan meningkatkan manajemen sistem pelayanan angkutan umum yang hirarkhis dan *integrated*;
3. Terciptanya pengembangan pelayanan angkutan umum massal pada wilayah perkotaan yang terintegrasi baik antar maupun intermoda, sehingga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas;
4. Meningkatnya pelayanan Transportasi yang lebih merata, termasuk ke wilayah perdesaan dan wilayah kepulauan;
5. Meningkatnya kualitas manajemen Transportasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, prasarana dan sarana, pemanfaatan sistem informasi yang efektif dan efisien serta koordinasi dan sinkronisasi lintas *stake holders*.

Dari 4 sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara, sasaran pelayanan angkutan umum yang murah, aman, nyaman, mudah, dan cepat, dengan meningkatkan manajemen sistem pelayanan angkutan umum yang hirarkhis dan *integrated* serta sasaran pengembangan pelayanan angkutan umum massal pada wilayah perkotaan yang terintegrasi baik antar maupun intermoda, sehingga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas menjadi aspek yang sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, sehingga harus tetap dilakukan koordinasi dan sinergitas dengan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara.

3. Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan dalam konstelasi pengembangan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangpro dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang berhierarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah;
2. Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien;
3. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan ke seluruh wilayah kota;
4. Pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota;
5. Peningkatan kualitas lingkungan yang seimbang dengan perkembangan kota;
6. Pengembangan kawasan strategis kota.

Dari 6 kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tebing Tinggi, aspek Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien menjadi salah satu acuan utama Dinas Perhubungan Kota Tebing dalam meningkatkan layanan bagi pengembangan/pembangunan Kota Tebing Tinggi.

4. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam isu prioritas pembangunan berkelanjutan dari aspek Sarana dan Prasarana dengan

TPB terkait yaitu

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;
- b. Mewujudkan sarana dan prasarana yang layak dan produktif;
- c. Koordinasi antar otorita dalam mewujudkan prioritas dan integrasi pembangunan infrastruktur daerah, provinsi hingga nasional.

Dengan mengacu pada analisis Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi antara lain:

1. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi maupun bagi stake holder lainnya.
2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor maupun becak. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini.
3. Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kota Tebing Tinggi yang harus dimutakhirkan kembali, dan tentunya tidak terlepas dari Tatanas (Tatanan Transportasi Nasional) dan Tatralok Provinsi Sumatera Utara yang menjadi acuan utama dalam menyusun, merancang dan menata sistem jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai akibat dari tingkat keterhubungan antar wilayah baik itu antar desa, antar kecamatan dalam wilayah Kota Tebing Tinggi atau bahkan antara Kota Tebing Tinggi dengan kabupaten/kota lainnya sehingga terwujud pemerataan aksesibilitas dan mobilitas bagi segenap kepentingan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kota Tebing Tinggi.
4. Keterbatasan kewenangan daerah dalam hal pembangunan maupun peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk giat dan aktif dalam melakukan koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Perhubungan.
5. Terbatasnya kemampuan APBD pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk fokus membiayai pembangunan di sektor perhubungan sehingga dibutuhkan bantuan berupa dana maupun sarana baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak swasta yang mau berinvestasi di sektor perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Disamping tantangan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas terdapat pula peluang yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah tepatnya pada bidang perhubungan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat, antara lain :

1. Peran Kota Tebing Tinggi akan semakin penting sebagai simpul perdagangan dan jasa regional terkait dengan keberadaan Bandara Kuala Namu dan Jalan Tol Medan – Tanjung Morawa – Tebing Tinggi dan jalan tol Pekanbaru – Dumai – Rantau Prapat – Kisaran – Tebing Tinggi yang berdampak besar pada pertumbuhan PDRB Kota Terutama dalam sektor Perdagangan dan Jasa. Penataan jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi baik didalam dan antar kota harus disusun secara komprehensif, penciptaan sarana dan prasarana perhubungan yang terintegrasi satu sama lain.
2. Dalam konteks nasional, Kota Tebing Tinggi masuk dalam pengembangan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-karo) dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang kedepannya membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal. Kota Tebing Tinggi juga berupaya menjadi kawasan *hinterland* untuk menopang celah fungsi kegiatan perkotaan bagi daerah-daerah sekitarnya, khususnya dalam bidang jasa dan perdagangan.
3. Dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota menitikberatkan pada peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jarak menengah (dalam kota). Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal (SAUM) dengan menyediakan Bus.
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih dapat diimplementasikan dalam pembangunan sektor perhubungan sehingga dapat membantu dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta dapat mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan dan transportasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah bidang perhubungan agar dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dimasa datang serta arah pembangunan yang akan ditentukan.

Berbagai permasalahan bidang perhubungan secara umum di Kota Tebing Tinggi yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Perhubungan	Masyarakat pengguna transportasi umum banyak yang beralih ke kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rute transportasi umum yang tidak melewati seluruh jaringan jalan yang tersedia 2. Angkutan umum yang sudah ada dinilai tidak cukup nyaman bagi penumpang 3. Kualitas dan kuantitas prasarana angkutan jalan yang belum memadai, seperti halte dan terminal penumpang 4. Belum mantapnya manajemen perusahaan angkutan kota 5. Tingkat pengetahuan dan disiplin operator/pengemudi angkutan yang rendah
	Kemacetan di beberapa lokasi pada jam-jam tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan pribadi 2. Banyaknya pengguna jalan yang belum tertib mematuhi peraturan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas 3. Adanya persimpangan jalan yang tidak dikendalikan dengan lampu lalu lintas (traffic light). 4. Banyaknya mobil yang parkir sembarangan di badan jalan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, warning light, Zona Selamat Sekolah, dan perlengkapan jalan lainnya) yang memadai 2. Perilaku masyarakat yang tidak taat aturan 3. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku 4. Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan 5. Kondisi jalan yang rusak
	Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya	Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya)

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum;
5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten;
6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian;
8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik.

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan adalah sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah berupa dukungan pendanaan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang terintegrasi guna mendorong pengembangan konektivitas Kota Tebing Tinggi dengan daerah sekitarnya. Kota Tebing Tinggi yang masuk dalam pengembangan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-karo) dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang kedepannya membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal. Kota Tebing Tinggi juga berupaya menjadi kawasan *hinterland* untuk menopang celah

fungsi kegiatan perkotaan bagi daerah-daerah sekitarnya, khususnya dalam bidang jasa dan perdagangan.

2. Pengadaan sarana transportasi massal dalam rangka memberikan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas yang merata terhadap masyarakat, angkutan umum untuk menjangkau wilayah-wilayah *hinterland*, serta angkutan khusus untuk kawasan pariwisata guna mendukung peningkatan pembangunan sektor pariwisata; dan
3. Pembangunan dan pengelolaan, sarana, prasarana, dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Keterbatasan Kewenangan Pengadaan / Pengembangan Sarana dan Prasarana	Bantuan Pemerintah Pusat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terjalin dengan baik

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Meningkatnya pemerataan pelayanan umum di bidang perhubungan dengan prioritas pada wilayah kepulauan, wilayah yang terlambat perkembangannya, wilayah potensial dan wilayah yang perkembangannya cukup dinamis;
2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang murah, aman, nyaman, mudah, dan cepat, dengan meningkatkan manajemen sistem pelayanan angkutan umum yang hirarkhis dan *integrated*;
3. Terciptanya pengembangan pelayanan angkutan umum massal pada wilayah perkotaan yang terintegrasi baik antar maupun intermoda, sehingga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas;

4. Meningkatnya pelayanan Transportasi yang lebih merata, termasuk ke wilayah perdesaan dan wilayah kepulauan;
5. Meningkatnya kualitas manajemen Transportasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, prasarana dan sarana, pemanfaatan sistem informasi yang efektif dan efisien serta koordinasi dan sinkronisasi lintas *stake holders*.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi berdasarkan
Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang murah, aman, nyaman, mudah, dan cepat, dengan meningkatkan manajemen sistem pelayanan angkutan umum yang hirarkhis dan <i>integrated</i>	Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi	Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi.	Koordinasi dengan Pengusaha angkutan umum berjalain dengan baik
2	Terciptanya pengembangan pelayanan angkutan umum massal pada wilayah perkotaan yang terintegrasi baik antar maupun intermoda, sehingga mampu mengurangi kepadatan lalu lintas;	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan prasarana transportasi	Terjadinya gesekan dengan pengusaha angkutan umum (swasta)	Bantuan Pemerintah Pusat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terjalin dengan baik

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033. Kedudukan RTRW Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033 dalam

penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagai keterpaduan sistem penataan ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan berkaitan dengan beberapa aspek yakni kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033. Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah kota dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033 meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang berhierarki dan terintegrasi yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan wilayah;
- b. Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perkotaan ke seluruh wilayah kota;
- d. Pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan yang seimbang dengan perkembangan kota;
- f. Pengembangan kawasan strategis kota.

Strategi Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien terdiri atas :

- a. Mengembangkan sistem jalan lingkaran utara – barat dan lingkaran luar timur – selatan untuk memfasilitasi pergerakan regional;
- b. Mengembangkan pola pergerakan internal dan eksternal yang efektif dan efisien;
- c. Mengembangkan keterpaduan stasiun kereta api dengan sistem transportasi darat lainnya;
- d. Menata kembali sistem angkutan umum perkotaan dan angkutan barang yang handal dan aman.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal yang efisien	Masih adanya kawasan yang belum terlayani trayek angkutan kota	Keterbatasan Pengusaha Angkutan	Sinergitas antar stakeholder terkait pelayanan angkutan terjalin dengan baik
		Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Keterbatasan Anggaran Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi
			Keterbatasan Kewenangan Pengadaan / Pengembangan Sarana dan Prasarana	Koordinasi antar Perangkat Daerah terjalin dengan baik

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada rumusan isu prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

Tabel 3.5

Rumusan Isu Prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tebing Tinggi

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait
1	Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga adat dan budaya lokal, b. Mempertahankan identitas Kota Tebing Tinggi sebagai lintasan sejarah bangsa c. Mengarahkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat singgah dan kuliner. d. Meningkatkan taraf layak hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan dan kompetensi
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru yang menyejahterakan b. Melakukan optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sebagai modal strategis dalam kompetisi. c. Menaikkan daya tarik investasi serta iklim investasi
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan sarana dan prasana yang memadai dan berkualitas. b. Mewujudkan sarana dan prasarana yang layak dan produktif c. Koordinasi antar otorita dalam mewujudkan prioritas dan integrasi pembangunan infrastruktur daerah, provinsi hingga nasional
4	Ketimpangan dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan pertumbuhan inklusif yang mampu menyerap sebanyak banyaknya tenaga kerja dan ramah pada keluarga miskin. b. Memperbesar investasi padat karya. c. Memberikan perhatian khusus pada UMKM, melalui dukungan pada penguatan teknologi, pemasaran, permodalan dan akses pasar. d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal
5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Transportasi	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Kebutuhan Infrastruktur dan Aksesibilitas antar wilayah yang sangat besar
			Keterbatasan anggaran Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi
			Keterbatasan Kewenangan Pengadaan / pengembangan Sarana dan Prasarana	Koordinasi antar Perangkat Daerah terjalin dengan baik

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

3.4.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang paling parah terdampak pada pandemi Covid-19, Berkurangnya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial oleh

pemerintah yang cukup merugikan transportasi. Transportasi nasional secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga merugikan banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti :

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan yang harus dicapai adalah Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan dengan indikator persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, dimana pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.

b. *Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change)*

Sektor transportasi merupakan pengguna energi bumi dan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya kendaraan. Eksploitasi sumber daya energi dan pemanfaatannya menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan secara global. Oleh karenanya diperlukan serangkaian upaya untuk meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada energi yang kurang ramah lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat agar menggunakan sarana transportasi yang ramah lingkungan, seperti pembangunan dan pengembangan fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor (pesepeda), mengembangkan kebijakan pemanfaatan sumber energi listrik untuk transportasi (seperti motor dan mobil listrik) dan membangun listrik tenaga surya pada fasilitas transportasi, seperti terminal, stasiun, dan lain-lain. Serangkaian program tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah kemacetan tetapi itu juga menyelesaikan masalah lingkungan dimana masyarakat tidak tergantung dengan kendaraan pribadi seperti motor, mobil yang mayoritas mengkonsumsi energi yang tidak ramah lingkungan.

c. *Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Ditengah perkembangan teknologi saat ini, teknologi informasi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, tak terkecuali di bidang transportasi. Pemerintah harus mendukung digitalisasi layanan transportasi dengan pembuatan regulasi sehingga transportasi tetap memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan. Diperlukan Roadmap Digitalisasi Transportasi agar dapat mengintegrasikan berbagai macam start up di bidang transportasi

untuk perbaikan kinerja transportasi di masa yang akan datang. Sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan sistem saling berintegrasi dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri atas sarana, prasarana dan manusianya serta aturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

3.4.2 Isu Strategis Nasional

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang yang diantaranya adalah Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diimplementasikan dengan agenda Penguatan infrastruktur yang diantaranya melalui Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Konektivitas multimoda transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Hal itu bergantung pada jalur distribusi yang memadai, ditunjukkan dengan integrasi jaringan jalan yang ada dengan simpul-simpul transportasi yang tersedia.

3.4.3 Isu Strategis Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

a. **Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah**

Infrastruktur memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penunjang kegiatan pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengadaan pelayanan. Untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi, Pemerintah harus mendorong pertumbuhan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan menciptakan keterhubungan atau konektivitas antar wilayah yang lebih baik sehingga dapat mempermudah arus barang dan manusia dalam hal kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan masih terus bertambahnya arus perpindahan orang dan barang, maka kebutuhan akan kemudahan transportasi yang baik dan tersedianya sistem multimoda yang terintegrasi secara baik masih sangat tinggi. Dalam pembangunan transportasi di Kota Tebing Tinggi.

b. **Implementasi Reformasi Birokrasi**

Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Namun, di Indonesia masih terdapat permasalahan birokrasi yang menyebabkan pelayanan publik belum optimal. Birokrasi yang tidak ideal menjadi salah satu masalah di Indonesia, masih banyaknya keluhan terhadap rendahnya kinerja pelayanan publik dan minimnya kualitas sumberdaya aparatur. Oleh karena itu, pencapaian tata kelola

pemerintahan memerlukan reformasi di berbagai bidang dimana termasuk didalamnya adalah reformasi birokrasi untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Organisasi perangkat daerah dituntut untuk selalu berupaya menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima.

c. Penanganan dan Pemulihan Covid-19 di Kota Tebing Tinggi

Pandemi Covid-19 menjadi bencana kesehatan kemanusiaan yang berimbas ke semua lini, berawal dari masalah kesehatan dan meluas ke masalah sosial ekonomi bahkan ke sektor keuangan. Salah satu yang berdampak adalah pada sektor transportasi dimana terjadi penurunan perjalanan dan penumpang, kegiatan jasa angkutan menurunnya penyerapan tenaga kerja dan *multiflier effect* lainnya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19, khususnya di bidang transportasi.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tebing Tinggi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pengusaha angkutan umum dan para pengemudi angkutan umum, baik dalam bentuk penindakan, pengaturan serta penyediaan perlengkapan keselamatan angkutan umum;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan antara lain fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
- c. Penyediaan dan pengembangan sarana angkutan umum massal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
- d. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan lokasi wisata di tengah perkotaan berpotensi menimbulkan kesemrawutan lalu lintas. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai kajian-kajian terkait dengan analisa dampak lalu lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan jalan berupa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang memadai serta melaksanakan pemeliharaan secara berkala agar tetap dapat berfungsi dengan baik;

- f. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar;
- g. Adanya pembatasan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dalam hal pengadaan/pengembangan sarana dan prasarana perhubungan sehingga harus tetap menjalin koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi pada jangka waktu 2023-2026. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut serta mengikuti dinamika dan perkembangan lingkungan secara terus menerus.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standar yang jelas dalam ukuran-ukuran kuantitatif, sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah Kota dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Penguatan Infrastruktur;
4. Pengoptimalan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya, yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan;
4. Meningkatnya Investasi;
5. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
8. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
9. Pelayanan Publik yang Prima.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang bersinergi dengan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu pada Tujuan ke 3, Meningkatkan Penguatan Infrastruktur dengan Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata. Pernyataan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi Akhir
			1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Prasarana Perhubungan	Pemasangan Rambu-Rambu	75%	78%	80%	82%	82%
	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum	Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi	72%	75%	77%	80%	80%
		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		Load factor angkutan perkotaan	60%	63%	67%	70%	70%
	Terwujudnya Angkutan Umum Yang Aman	Persentase Uji Kir Angkutan Perkotaan Yang Beroperasi	87%	88%	89%	90%	90%
	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Kecepatan Rata-Rata	34,56 Km/Jam	35,27 Km/Jam	35,49 Km/Jam	35,84 Km/Jam	35,84 Km/Jam

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan merupakan pijakan dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan yang akan dilakukan kedepan.

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tebing Tinggi. Untuk mewujudkannya, maka perlu adanya penjabaran secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan setiap tahunnya selama empat tahun kedepan. Hal ini nantinya akan mempermudah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas yang tertuang dalam RPD Kota Tebing Tinggi 2023-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Prasarana Perhubungan	Meningkatkan Prasarana Perhubungan Yang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai dengan kebutuhan kinerja lalu lintas Penyelenggaraan b) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Penguatan Konektivitas Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengkajian teknis jaringan layanan transportasi b) Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke seluruh wilayah kota c) Penyelenggaraan ijin trayek dan ijin usaha dalam rangka pengendalian ketersediaan angkutan
	Terwujudnya Angkutan Umum Yang Aman	Meningkatkan Angkutan Umum Yang Laik Jalan	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terakreditasi; b) Pengawasan dan penindakan terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi standar keselamatan
	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan penataan dan penyelenggaraan tertib lalu lintas melalui pembangunan sitem pengendalian dan operasi b) Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lalu lintas c) Penyelenggaraan kegiatan survey kinerja lalu lintas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang menyangkut perhubungan sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran indikatif sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan.

Terdapat 2 (Dua) Program pada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dalam penetapan program dan kegiatan, juga ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Selain itu juga ditetapkan pendanaan indikatif yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan selama 4 tahun (2023-2026).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)							
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.378.400.000		7.869.150.000		10.435.197.500		10.127.306.375		34.810.053.875				
		2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	24 Laporan	14.000.000	24 Laporan	16.000.000	24 Laporan	17.000.000	24 Laporan	18.000.000	96 Laporan	65.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi		
		2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
		2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	3.685.000.000	38 Orang/Bulan	3.700.000.000	38 Orang/Bulan	4.100.000.000	38 Orang/Bulan	4.500.000.000	152 Orang/Bulan	15.985.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi		
		2	15	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2	15	01	2,04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Lapo ran	10.000.00 0	1 Lapo ran	12.000.00 0	1 Lapo ran	14.000.000	1 Lapo ran	16.000.000	4 Lapo ran	52.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
		2	15	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	183.400.0 00	1 Paket	190.000.0 00	1 Paket	210.000.000	1 Paket	250.000 .000	4 Paket	833.400.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	8.000.0 00	4 Paket	24.500.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.00 0	1 Paket	85.000.00 0	1 Paket	120.000.000	1 Paket	160.000 .000	4 Paket	430.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.000.00 0	1 Paket	45.150.00 0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	65.000. 000	4 Paket	192.150.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.000.00 0	1 Paket	110.000.0 00	1 Paket	135.000.000	1 Paket	150.000 .000	4 Paket	485.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Doku men	5.500.000	12 Doku men	6.000.000	12 Doku men	7.000.000	12 Doku men	8.000.0 00	48 Doku men	26.500.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Lapo ran	200.000.0 00	12 Lapo ran	210.000.0 00	12 Lapo ran	232.197.500	12 Lapo ran	250.000 .000	48 Lapo ran	892.197.500	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		2	15	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1.335.000 .000	0 Unit	0	1 Unit	1.800.0 00.000	2Unit	3.135.000.0 00	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	2.900.000.0 00	0 Unit	0	1 Unit	2.900.000.0 00	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	300.000.0 00	2 Unit	320.000.0 00	2 Unit	520.000.000	2 Unit	637.306 .375	8 Unit	1.777.306.3 75	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapo ran	170.000.0 00	12 Lapo ran	175.000.0 00	12 Lapo ran	180.000.000	12 Lapo ran	200.000 .000	48 Lapo ran	725.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapo ran	1.030.000 .000	12 Lapo ran	1.050.000 .000	12 Lapo ran	1.070.000.0 00	12 Lapo ran	1.100.0 00.000	48 Lapo ran	4.250.000.0 00	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)							
									Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
		2	15	02	2,02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	5 Unit	300.000.000	5 Unit	320.000.000	5 Unit	350.000.000	15 Unit	970.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi		
		2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	15 Unit	167.704.000	15 Unit	500.000.000	15 Unit	571.370.000	15 Unit	580.000.000	60 Unit	1.819.074.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi	
		2	15	02	2,02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit	15 Unit	275.000.000	15 Unit	300.000.000	15 Unit	325.000.000	45 Unit	900.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi		
		2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9 Unit	25 Unit	195.000.000	25 Unit	300.000.000	25 Unit	320.000.000	25 Unit	340.000.000	100 Unit	1.155.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi	
		2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
		2	15	02	2,03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	800.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi	
		2	15	02	2,03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	400.000.000	2 Unit	450.000.000	2 Unit	455.000.000	6 Unit	1.305.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi		
		2	15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1 Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	450.000.000	2 Unit	460.000.000	6 Unit	1.410.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
									Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		2	15	02	2,05																
		2	15	02	2,05	03	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		2	15	02	2,05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	6.000 Unit	6.000 Unit	73.000.000	6.000 Unit	74.000.000	6.000 Unit	75.000.000	6.000 Unit	76.000.000	24.000 Unit	298.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	165.000.000	6.000 Dokumen	170.000.000	6.000 Dokumen	175.000.000	6.000 Dokumen	180.000.000	24.000 Dokumen	690.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	63.066.000	4 Laporan	138.066.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	87.000.000	11 Unit	90.000.000	11 Unit	92.000.000	11 Unit	94.000.000	44 Unit	363.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2,06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	20.000.000	5 Laporan	144.097.000	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	165.000.000	16 Laporan	479.097.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2	15	02	2,06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	86.000.000	3 Dokumen	88.000.000	10 Dokumen	279.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	465.000.000	12 Laporan	470.000.000	48 Laporan	1.705.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	45.000.000	8 Laporan	140.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan														
		2	15	02	2,08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	16.000.000	4 Laporan	52.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
									Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		2	15	02	2,09																
		2	15	02	2,09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2,09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	32 Unit	2 Unit	120.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	175.000.000	2 Unit	180.000.000	8 Unit	625.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	18.000.000	4 Laporan	60.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	56.000.000	4 Dokumen	212.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)					
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.000.000	4 Dokumen	53.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	54.000.000	4 Laporan	156.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi
		2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	51.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun-1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)						
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp					Targ et
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	51.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi	
		2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	56.000.000	4 Dokumen	212.000.000	Dinas Perhubungan	Tebing Tinggi	
TOTAL											8.043.104.000		11.778.247.000		14.667.567.500		14.544.372.375		49.033.290.875			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi. Dinas Perhubungan mempunyai 4 (empat) indikator yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan Rambu – Rambu;
2. Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi;
3. Jumlah Terminal Penumpang Tipe C
4. Load factor angkutan perkotaan
5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum;
6. Kecepatan Rata-Rata;

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Perhubungan terhadap RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPD yang menjadi urusan Dinas Perhubungan dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan. Untuk rincian indikator beserta targetnya per tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemasangan Rambu-Rambu	n/a	75%	78%	80%	82%	82%
2	Jumlah Kendaraan Yang Beroperasi	n/a	72%	75%	77%	80%	80%
3	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
4	Load factor angkutan perkotaan	n/a	60%	63%	67%	70%	70%
5	Persentase Uji Kir Angkutan Perkotaan Yang Beroperasi	n/a	87%	88%	89%	90%	90%
6	Kecepatan Rata-Rata	n/a	34,56 Km/Jam	35,27 Km/Jam	35,49 Km/Jam	35,84 Km/Jam	35,84 Km/Jam

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 merupakan Komitmen Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 4 tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Hal-hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dan instansi terkait lainnya. Selain itu diperlukan keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Rencana Strategis ini diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi semakin lebih baik.